

BAB V

KESIMPULAN

Politik luar negeri Amerika cenderung identik dengan penegakan HAM dan demokrasi. Karena secara umum kepentingan nasional Amerika adalah berupaya untuk menegakkan HAM dan demokrasi di dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, dengan berakhirnya Perang Dingin, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia memasuki tahapan baru. Pada tahapan ini, isu-isu pelanggaran HAM muncul menjadi isu utama. Isu-isu pelanggaran HAM, juga pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia, mulai dipersoalkan oleh Pemerintah Amerika, dengan dampak sangat serius terhadap hubungan antara kedua negara. Perhatian penuh terhadap isu-isu baru tersebut, tampak jelas kontras dengan situasi sebelum Perang Dingin berakhir, dimana Pemerintahan Amerika cenderung menganggap pelanggaran HAM sebagai urusan dalam negeri Indonesia, sehingga tidak perlu diintervensi.

Isu HAM terus berlanjut hingga peristiwa serangan 11 September 2001 pada saat pemerintahan Bush. Politik luar negeri Amerika mengalami perubahan ketika Bush mendeklarasikan *War on Terror*. Isu teroris yang diangkat oleh Bush sebagai dalang dibalik serangan terhadap gedung WTC dan Pentagon. Bush berupaya untuk memberantas teroris di seluruh dunia. Sebagai langkah pertama adalah melakukan serangan ke Afghanistan kemudian dilanjutkan ke Irak. Indonesia pun mengalami tekanan dari Amerika untuk turut ikut serta dalam memerangi teroris. Indonesia yang mengalami pukulan ketika terjadinya Bom Bali I, mau tidak mau harus mengikuti kebijakan Bush untuk turut serta dalam

memberantas teroris. kepentingan Bush dari *War on Terror* semata-mata hanyalah untuk menutupi kelemahan militer dan keamanan Amerika ketika mendapat serangan pada 11 September 2001. Berbagai bantuan militer seperti program MET dan pencabutan embargo militer kembali diberlakukan setelah lama dibekukan.

Pemerintahan Bush yang kontroversial membuat citra Amerika di dunia Islam menjadi buruk serta jatuh kedalam krisis global. Amerika seolah-olah menjadi musuh bersama bagi negara-negara Islam. Bush yang menjadikan terorisme sebagai tolak ukur dalam hubungannya terhadap negara lain, ikut menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis Amerika untuk memberantas teroris. Berbagai kebijakan Bush, seperti bantuan kerjasama militer yang bertujuan memperkuat militer Indonesia dalam menghadapi teroris.

Diakhir pemerintahan Bush Amerika mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Dampak dari krisis perekonomian Amerika mengalami keterpurukan, utang nasional dan pengangguran meningkat. Obama muncul sebagai pengganti Bush pada pemilihan Presiden Amerika ke-44 tanggal 4 November 2008. Tugas Obama sebagai pewaris tahta Bush sangat berat. Mengangkat perekonomian Amerika yang ambruk serta membersihkan nama baik Amerika di dunia Islam. Obama menyatakan bahwa *soft power* sebagai landasan kebijakan politik luar negerinya. Obama lebih mengangkat isu perdamaian dan menghilangkan isu teroris dari kebijakan luar negeri Amerika.

Kebijakan Obama terhadap Indonesia lebih bersahabat. Obama ingin memperbaiki hubungan dengan Indonesia serta menghilangkan tekanan yang telah

dilancarkan oleh Bush. Perbaikan hubungan ini memberikan dampak yang positif bagi kedua negara. Berbagai kerjasama yang telah dilakukan, seperti kunjungan dialog antar agama, pertemuan bilateral dengan Presiden SBY serta kunjungan antar delegasi, membuktikan keinginan bahwa kebijakan Obama jauh dari isu terorisme. Kepentingan Obama dibalik mesranya hubungan Amerika-Indonesia adalah untuk melindungi aset perusahaan Amerika di Indonesia. selain itu Obama menganggap Indonesia sebagai batu loncatan untuk memperbaiki citra Amerika di mata dunia Islam. Semua kepentingan itu untuk memperbaiki perekonomian Amerika yang hancur dilanda krisis.

Isu perdamaian yang diangkat Obama untuk mencapai kepentingan ekonomi dalam kebijakan politik luar negeri Amerika, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan bush dalam politik luar negerinya. Dibawah pemerintahan Obama, Amerika lebih ramah dalam berhubungan dengan Indonesia, berbeda dibawah pemerintahan Bush yang penuh dengan tekanan.